

KEABSAHAN PENYETORAN MODAL OLEH PARA PENDIRI PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

(Studi kasus PT. Mulia Qiyada Jaya, Yogyakarta).

Zaenal Arifin Ristono¹, Nindyo Pramono².

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyetoran modal berdasarkan surat pernyataan oleh para pendiri yang telah menyetor modal perseroan sudah dapat dikualifikasikan sebagai setoran modal PT secara sah, tujuan lain untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum bagi pendiri PT yang telah melakukan setoran modal, dimana setelah PT berstatus menjadi badan hukum ternyata pendiri PT lainnya tidak melakukan setoran modal secara riil ke kas perseroan kecuali hanya surat pernyataan penyetoran modal.

Metode penelitian dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder yaitu penelitian yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur, akta, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah dan sebagainya). Seluruh data yang diperoleh atau didapatkan dalam penelitian ini, dianalisa secara kualitatif, yaitu data terpilih baik data primer maupun data sekunder disusun secara sistematis untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan lengkap mengenai permasalahan yang dibahas.

Hasil penelitian menunjukkan: 1. Penyetoran modal berdasarkan surat pernyataan oleh para pendiri PT. Mulai Qiyada Jaya belum dapat dikualifikasikan sebagai setoran modal PT secara sah. Walaupun telah mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum. Surat pernyataan telah menyetor modal yang dibuat oleh para pendiri tidak sesuai dengan apa yang dipersyaratkan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sebagaimana ketentuan didalam Pasal 13 ayat 3 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2014 sebagai salah satu peraturan pelaksana dari UUPT. 2. Perlindungan hukum bagi pendiri yang telah menyetorkan modal yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam hal ini melalui gugatan pemenuhan kewajiban penyetoran / gugatan wanprestasi. Selain gugatan perdata wanprestasi para pendiri dapat mengajukan gugatan derivatif. (*Derivative right*).

Kata Kunci : Perseroan, Setoran, Modal.

¹ Mahasiswa Pascasarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

THE RESPONSIBILITY OF CAPITAL RETURNS BY THE LIMITED FOUNDERS OF THE COMPANY BY LAW NO. 40 OF 2007 CONCERNING THE LIMITED COMPANY.

(Case study of PT. Mulia Qiyada Jaya, Yogyakarta)

Zaenal Arifin Ristono¹, Nindyo Pramono.²

ABSTRACT

This study aims to find out and analyze capital deposits based on a statement by the founders who have deposited the company's capital can qualify as a legitimate capital deposit of PT, another purpose to find out and review legal protection for the founders of PT who have made capital deposits, after PT being a legal entity it turns out that the other PT founders did not make real capital payments to the company's cash unless only a capital deposit statement.

The research method in this thesis is normative juridical research that uses secondary data, namely research based on applicable laws and regulations. The method of data collection in this study was carried out by literature study, namely a method of collecting data by searching and analyzing library materials (literature, deeds, research results, scientific magazines, scientific bulletins, scientific journals and so on). All data obtained or obtained in this study, analyzed qualitatively, namely selected data both primary data and secondary data arranged systematically to get a clear and complete picture of the issues discussed.

The results of the study show: 1. A statement of remittance of PT capital based on a statement by the founders that has deposited the company's capital can be qualified as a legitimate capital deposit of PT, but the authors have another opinion specifically for the statement made as a condition of establishing PT. Mala Qiyada Jaya even though it has been approved as a legal entity, the author believes that it cannot be qualified as a legitimate PT capital deposit. 2. Legal protection for founders / shareholders who have deposited capital, namely based on laws and regulations in this case through a claim to fulfill the obligation to deposit / claim default. In addition to a civil lawsuit, the defaults of the founders can file derivative claims (*Derivative right*).

Keywords: Company, Deposit, Capital.

¹ Postgraduate student in Master of Business Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta.

² Lecturer at the Faculty of Law, Gadjah Mada University, Yogyakarta.